

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Kaomaneng (2016) menyatakan bahwa gereja memerlukan sebuah sistem informasi akuntansi sebagai alat bantu dalam pengelolaan, perencanaan dan pengawasan keuangan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini sama dengan hasil penelitian Ihejeme, *et al* (2015) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi gereja secara signifikan diperlukan pada zaman sekarang untuk memastikan perhitungan sumber daya dan akuntansi yang tepat untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwan penerapan sistem informasi akuntansi pada gereja sangat lah diperlukan sebagai acuan bagi organisasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan organisasi.

Teknologi komputerisasi yang berkembang dengan sangat pesat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem informasi akuntansi yang ada pada sebuah organisasi. Nena Du'a (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi berbasis komputer serta pemrosesan data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat meningkatkan perhatian pada area khusus akuntansi yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Hal serupa juga disampaikan oleh Layli (2015) ia menyatakan bahwa sebuah sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan pada organisasi. Tetapi pada prakteknya masih banyak organisasi nirlaba yang belum menerapkan sistem akuntansi berbasis komputer. Kahubung (2013) pada penelitiannya tentang sistem informasi akuntansi pada organisasi nirlaba menyatakan bahwa Jemaat GMIM Nafiri masih menggunakan sistem manual yang memiliki kelemahan pada pemisahan tugas antara pencatatan dan penyimpanan kas.

Layli (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki suatu pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada sistem informasi dapat berguna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

seperti adanya kesalahan atau kecurangan. Hamel (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung jalannya sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Saifudin dan Firda (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal di RSUP Dr. Kariadi Semarang sudah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan oleh rumah sakit lain dan sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasional, fungsi penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan, serta fungsi pencatatan dan pelaporan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang di terapkan pada sebuah organisasi memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling mendukung dalam menjaga dan mengelola aset- aset yang dimiliki organisasi.

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting. Kalendesang (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal dilakukan untuk mengawasi apakah kegiatan operasional maupun finansial organisasi telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ada. Syukriyati dan Solikin (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan salah satu aspek utama agar tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan dapat tercapai dan juga dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana. Amanda (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi harta yang dimiliki sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, serta memastikan bahwa semua ketentuan, peraturan serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan dengan baik oleh seluruh karyawan perusahaan. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan salah satu aspek yang penting untuk sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi.

Meskipun merupakan hal yang sangat penting, namun dalam prakteknya masih banyak organisasi yang belum menerapkan pengendalian internal dengan baik. Konde dan Iqbal (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas dan prosedur akuntansi PT. Kaltim Nusa Etika masih belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian intern, karena masih ada

beberapa unsur pengendalian intern dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Siregar (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada Dompot Dhuafa Waspada Sumut belum berjalan dengan baik karena pada prosedur pencatatan dan otorisasi, tidak semua bukti penerimaan dan pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Penelitian diatas membuktikan bahwa masih banyak organisasi yang belum menerapkan pengendalian internal dengan baik.

Penerapan pengendalian internal tidak hanya perlu dilakukan pada organisasi yang berorientasi pada laba tetapi pengendalian internal perlu juga diterapkan pada organisasi nirlaba seperti gereja. Kurniasih dan Prabowo (2017) menyatakan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di gereja yang mengakibatkan kepercayaan anggota jemaat turun, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem pengelolaan keuangan yang baik dan pengendalian internal didalam sebuah gereja. Pengendalian internal sangat diperlukan oleh gereja untuk memastikan bahwa pelaksanaan organisasi sesuai dengan pedoman pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan gereja sehingga dapat meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengakibatkan tujuan gereja tidak tercapai. Namun penelitian yang dilakukan Keller dan Owens (2015) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal pada banyak gereja masih tergolong lemah dan tidak lengkap. Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal pada gereja sangatlah diperlukan. Namun masih terdapat banyak gereja yang belum menerapkan pengendalian internal secara baik dalam aktivitas pengelolaan keuangan yang ada di gereja tersebut

Dalam penerapan pengendalian internal masing-masing gereja memiliki corak atau cara dan ciri yang berbeda dalam menjalankannya. Setiyani dan Purwanugraha (2016) menyatakan bahwa masing-masing gereja ciri dan corak dalam pengembangan dan penerapan pengendalian internalnya. Prabowo dan Kurniasih dan Prabowo (2017) menyatakan bahwa GKJ Wedi hanya melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kas saja, tidak melakukan pencatatan dan pelaporan aset yang lain seperti bangunan dan kendaraan. Dari hasil penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal pada masing-masing gereja memiliki ciri dan corak yang berbeda.

Duncan dan Morris (2014) menyatakan bahwa baik atau tidaknya pengendalian internal pada sebuah gereja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyimpangan yang ada pada gereja tersebut. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ahiabor dan Collins (2014) tentang pengendalian internal pada gereja. Menyatakan bahwa pengendalian internal yang kurang memadai dapat menghalangi keefektifan petugas gereja. Hal itu dapat menempatkan mereka dalam posisi dimana dapat membuat mereka tergoda untuk terlibat dalam aktivitas yang menyimpang dari yang seharusnya. Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai peranan penting dalam menjaga dan mengelola aset-aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan.

Di dalam menjalankan pemerintahan baik itu lembaga pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebuah pengendalian internal juga diperlukan untuk menjaga asset dan meningkatkan kinerja dari lembaga pemerintahan tersebut. Tresnawati (2015) menyatakan bahwa pengendalian intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hal tersebut serupa dengan Lamusu (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang ada pada lembaga pemerintahan daerah Gorontalo namun Syarifuddin (2016) tidak sependapat dengan penelitian diatas, dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa lembaga pemerintahan memerlukan sebuah sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan, menjaga asset dan meningkatkan kinerjanya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Organisasi

Pengertian Organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan sebagai wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi setiap anggotanya harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Menurut Robbin (2011:235) organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Sedangkan menurut Hasibuan (2011:120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Karakteristik Organisasi

Organisasi memiliki beberapa karakteristik, berikut adalah karakteristik yang dimiliki oleh organisasi menurut Robbin (2011:235) :

1. Unit/Entitas Sosial

Organisasi merupakan hasil karya manusia yang bersifat tidak kasat mata dan abstrak, karena sifatnya tersebut organisasi lebih merupakan realitas sosial ketimbang sebagai realitas fisik.

2. Beranggotakan Minimal Dua Orang

Salah satu persyaratan agar sebuah entitas sosial dapat disebut sebagai sebuah organisasi adalah harus beranggotakan minimal dua orang atau lebih

agar kedua orang tersebut dapat saling bekerjasama, melakukan pembagian kerja, dan terdapat spesialisasi dalam pekerjaan yang mereka jalankan.

3. Berpola Kerja Yang Terstruktur

Apabila sudah terdapat beberapa orang yang berkumpul dalam sebuah entitas sosial tetapi belum memiliki pola kerja yang terstruktur dan tidak terkoordinasi maka entitas tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi.

4. Mempunyai Tujuan

Tujuan di dirikannya sebuah organisasi adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang sedari awal organisasi tersebut dibentuk sudah ditetapkan.

5. Mempunyai Identitas Diri

Identitas formal sebuah organisasi dapat dilihat dari akta pendirian organisasi tersebut yang menjelaskan tentang siapa saja yang menjadi bagian dari organisasi, kegiatan apa yang dilakukan, bagaimana dan oleh siapa organisasi tersebut diatur. Disamping itu identitas sebuah organisasi dapat juga dilihat dari budaya yang diterapkan di organisasi tersebut.

Prinsip Organisasi

Prinsip organisasi adalah suatu pondasi yang menjadi pokok dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dibangun dan digerakan diatas pondasi yang berupa prinsip organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi menurut Robbin (2011:237) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang jelas

Tujuan merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.

2. Mempunyai kesatuan perintah

Maksud dari prinsi ini adalah bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya memiliki atasan langsung.Hal ini berarti setiap bawahan hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang bawahan bertanggung jawab secara langsung kepada atasannya.

3. Ada keseimbangan

Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan kerugian yang diderita oleh suatu unit harus diimbangi oleh keuntungan yang didapat dari unit lain.

4. Ada pendistribusian pekerjaan

Prinsip pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas.Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen adalah mengelompokan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri.Jadi dalam pembagian tugas, macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu atau pejabat tertentu.

5. Ada rentangan pengawasan

Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seseorang pemimpin mampu mengawasi bawahannya secara cepat dan tepat.

6. Ada pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian kekuasaan dari seseorang atasan kepada pejabat bawahan dan kepada pejabat lain untuk melakukan suatu pertanggungjawaban. Jadi, pelimpahan belum tentu mengalir dari seorang atasan kepada bawahan, tetapi dapat juga terjadi dari seorang atasan kepada pejabat yang setingkat.

7. Ada departementalisasi

Prinsip departementalisasi disebut juga dengan istilah departementasi. Departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi merupakan tugas dan tanggung jawab dari suatu unit tertentu dalam organisasi.

8. Ada penempatan pegawai yang tepat

Salah satu prinsip bidang kepegawaian adalah *the right man in the right place*, yang berarti penempatan pegawai harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

9. Ada koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselarasan gerak, keselarasan aktivitas dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada didalam organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/kesatuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi.

10. Ada balas jasa yang memuaskan

Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seorang atas jerih payah yang telah disumbangkannya. Untuk memberikan balas jasa yang memuaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan gaji yang menarik dan dengan pemberian jaminan sosial.

Ciri-Ciri dan Unsur Organisasi

Ada beberapa ciri-ciri dari organisasi, menurut Robbin (2011:240) didalam bukunya mengemukakan bahwa organisasi memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah:

1. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personel.
2. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijakan, strategi, anggaran dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
4. Peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi , mesin-mesin, uang dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).
5. Lingkungan.
6. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, cuaca, udara, air, flora dan fauna.
7. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi Nirlaba

Secara umum organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* adalah sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan atau orientasi terhadap laba atau keuntungan. Kebanyakan organisasi nirlaba bergerak di bidang sosial atau pun keagamaan. Berikut ini adalah contoh dari organisasi nirlaba:

1. Rumah sakit pemerintah
2. Sekolah pemerintah
3. Universitas pemerintah
4. Yayasan keagamaan
5. Lembaga Pemerintah

Menurut Mahsun *et al* (2013:185) organisasi nirlaba adalah sebuah organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut Muhtia dan I Gusti (2016:2) organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanannya.

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah yang bertujuan menyediakan pelayanan bagi masyarakat tanpa berorientasi pada keuntungan.

Karakteristik Organisasi Nirlaba

Mahsun (2013:187) menjelaskan bahwa organisasi nirlaba memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Berdasarkan beberapa karakteristik diatas, maka gereja dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba. Sumber daya yang diperoleh gereja berasal dari para jemaat yang memberi secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan kembali. Gereja juga tidak memiliki tujuan untuk mencari laba, melainkan lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggota jemaatnya.

2.2.2. Gereja

Pengertian Gereja

Menurut Sukoco (2010:22) Gereja adalah kehidupan bersama religious kristiani yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang didalamnya Roh Kudus bekerja dalam rangka pekerjaan penyelamatan Allah. Ada dua sisi yang dipakai untuk memahami mengenai gereja, yaitu:

1. Sisi Illahi

Dalam sisi illahi, gereja diyakini sebagai “buah pekerjaan penyelamatan Allah”. Allah mengasihi gereja dan menguduskannya untuk menjadi milik kepunyaan-Nya. Allah memperdulikan gereja, memelihara gereja, dan menerima segala sesuatu yang dipersembahkan oleh orang-orang percaya kepada-Nya didalam dan melalui kehidupan gereja.

2. Sisi Manusiawi

Dalam sisi manusiawi, gereja sebagai suatu kehidupan bersama religious yang diciptakan dan dijalani oleh manusia untuk menjawab penyelamatan Allah.

Sistem Pemerintahan Gereja

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan gereja adalah tata cara yang dipakai untuk mendasari pengorganisasian atau pemerintahan di gereja. Menurut Sukoco (2010:30) terdapat beberapa model sistem pemerintahan gereja, yaitu:

- a. *Sistem Papal*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang secara hierarkis dipimpin oleh Paus sebagai kepala gereja sedunia, yang merupakan wakil Kristus di dunia ini.
- b. *Sistem Caeropapal*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang secara hierarkis dipimpin oleh raja sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin gereja.
- c. *Sistem Episcopal*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh para imam.
- d. *Sistem Collegial*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh majelis gereja, majelis klasis, dan majelis sinode yang memiliki kewenangannya masing-masing.
- e. *Sistem Kongregasional*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang mengakui bahwa masing-masing gereja berdiri sendiri-sendiri secara independen, tanpa hubungan yang satu dengan yang lainnya.
- f. *Sistem Presbiterial*, yaitu sistem pemerintahan gereja yang dipimpin oleh majelis gereja (presbiter) pada masing-masing gereja.

Manajemen Keuangan Gereja

Menurut Halim (2012:457) manajemen keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai sebuah organisasi. Dalam konteks peribadatan Halim (2012:457) menyatakan bahwa manajemen keuangan peribadatan sebuah gereja adalah usaha yang dilakukan oleh pengurus gereja dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama, serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama. Dalam manajemen keuangan terdapat 2 fungsi, yaitu:

a. Fungsi Mendapatkan Dana

Fungsi mendapatkan dana adalah bagaimana cara pengurus gereja dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat.

b. Fungsi Menggunakan Dana

Fungsi menggunakan dana adalah bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Fungsi ini juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Sumber pendanaan gereja berasal dari persembahan jemaat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana tersebut dilakukan secara sukarela atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai umat beragama. Pertanggungjawaban gereja dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan oleh pengurus gereja.

2.2.3. Sistem Informasi Akuntansi

Secara umum sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat dan memproses data keuangan dan data nonkeuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Romney dan Steinbart (2015:11), akuntansi adalah sistem informasi karena sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan.

Hal serupa disampaikan juga oleh Mulyadi (2016:3) dia menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses dan mengumpulkan data transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sebuah sistem informasi akuntansi yang baik dapat tercipta dari adanya sebuah kerjasama yang baik pula diantara manusia dengan sumber daya yang lainnya didalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan umum dari pengembangan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016:19) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan dalam organisasi.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Sedangkan Romney dan Steinbart (2015:19) menyatakan bahwa tujuan dari sistem informasi akuntansi:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Adapun unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2015: 11), adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang organisasi dan aktivitasnya
4. *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:73-76), unsur-unsur sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak (*Software*)
2. Perangkat Keras (*Hardware*)
3. Manusia (*Brainware*)
4. Prosedur (*Procedure*)
5. Data (*Database*)
6. Jaringan Komunikasi (*Communication Network*)

Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Bagi Organisasi

Sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar aktivitas dalam rantai nilai dan dijalankan dengan efektif dan efisien (Romney dan Steinbart, 2015:8). Manfaat-manfaat diterapkannya sistem informasi akuntansi bagi organisasi, diantaranya:

1. Memperbaiki kualitas serta mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa.

Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan informasi apabila terjadi proses produksi yang kurang baik atau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan organisasi, sehingga dapat segera diperbaiki.

2. Memperbaiki Efisiensi

Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang tepat waktu.

3. Memperbaiki Pengambilan Keputusan

Sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang tepat waktu.

4. Berbagi Pengetahuan

Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat mempermudah proses berbagi pengetahuan dan keahlian, yang selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan dan bahkan memberi keunggulan yang kompetitif.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:8), manfaat dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Aktivitas Sehari-hari Dalam Perusahaan

Agar sebuah perusahaan dapat bertahan, perusahaan tersebut harus selalu melakukan kegiatan bisnis yang biasa disebut transaksi, seperti pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.

2. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan

Salah satu manfaat dari sistem informasi akuntansi adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat.

3. Membantu Perusahaan Memenuhi Tanggung Jawab Pada Pihak Eksternal

Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat kepada semua pihak yang memiliki kepentingan atau

stakeholder yang meliputi investor, pemasok, pelanggan, para pekerja atau public secara umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan aktifitas organisasi, karena dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan mengurangi ketidakpastian terhadap tindakan yang telah dilakukan.

2.2.4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuannya. Tanpa adanya pengendalian internal yang baik, tujuan dari sebuah organisasi tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Semakin besar sebuah organisasi maka semakin penting pula fungsi pengendalian internal dalam organisasi tersebut.

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada (Romney dan Steinbart, 2015:216).

Sedangkan menurut Hery (2013:159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh anggota organisasi.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara yang berisikan seperangkat kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya

perusahaan agar dapat terhindar dari semua bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan.

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Hery (2013:160) tujuan pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki oleh organisasi telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu atau oknum karyawan tertentu
2. Pengendalian diterapkan agar supaya seluruh aset organisasi dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
3. Informasi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan.
4. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:140) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kekayaan perusahaan
 - 1) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 - 1) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi.

Unsur-Unsur Pengendalian Internal

COSO (2013:4) mengklasifikasikan 5 unsur dari pengendalian internal (*elements internal control*). Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu sendiri.

2. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian umumnya terdiri dari lima jenis aktivitas seperti pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, pemeriksaan kinerja secara independen.

4. Pengawasan

Pengawasan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau secara periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

5. Informasi dan komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

Adapun Mulyadi (2016:150) menyebutkan ada empat unsur pengendalian internal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional.

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka untuk pembagian tanggung jawab atau pemisahan fungsi pada setiap anggota organisasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pokok dari organisasi. Pembagian tanggung jawab dan pemisahan fungsi dalam sebuah organisasi harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Harus memisahkan fungsi-fungsi operasi dan fungsi-fungsi penyimpanan.
- b. Suatu fungsi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan semua tahap dari transaksi.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Dalam sebuah organisasi semua transaksi yang ada hanya dapat terjadi apabila ada otorisasi dari pihak yang memiliki wewenang. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi harus dibuat sebuah sistem yang mengatur otorisasi dalam setiap transaksi yang terlaksana. Sedangkan prosedur pencatatan yang baik dalam sebuah organisasi akan menjamin data yang direkam dalam dokumen atau catatan akuntan dengan ketelitian dan keandalan yang tinggi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab atau pemisahan fungsi, sistem otorisasi dan prosedur tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada praktik yang sehat didalam sebuah organisasi. Adapun cara-cara yang digunakan oleh sebuah organisasi guna mewujudkan praktik yang sehat adalah:

- a. Penggunaan dokumen, formulir dan bukti-bukti transaksi bernomor urut tercetak. Karena semua hal tersebut merupakan sebuah alat untuk memberikan otorisasi guna terlaksannya sebuah transaksi, sehingga dengan pemberian nomor urut akan dapat menetapkan pertanggungjawaban transaksi.

- b. Pengawasan dan evaluasi, dengan adanya sebuah pengawasan dan evaluasi maka organisasi dapat selalu mengontrol semua transaksi yang terjadi, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurangan.
4. Karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Di dalam mencapai tujuannya sebuah organisasi memerlukan orang-orang yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu faktor kejujuran dan pengalaman menjadi kunci penting keberhasilan dalam sebuah organisasi. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan bertanggung jawab ada beberapa cara yang dapat ditempuh:

- a. Seleksi calon karyawan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap semua karyawan.
- c. Menanamkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

Jenis-Jenis Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:145), pengendalian internal dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

1. Pengendalian Preventif
Pengendalian ini dilakukan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti pemisahan fungsi.
2. Pengendalian Detektif
Pengendalian ini memfokuskan pada upaya penemuan sebuah kesalahan yang mungkin terjadi, seperti rekonsiliasi bank dan perhitungan fisik kas.
3. Pengendalian Korektif
Pengendalian ini sebagai upaya mengoreksi penyebab terjadinya masalah dan sebagai antisipasi agar kesalahan yang sama tidak terulang dimasa yang akan datang.

4. Pengendalian Langsung

Pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung agar sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti supervisi oleh atasan kepada bawahan.

5. Pengendalian Kompensatif

Pengendalian ini merupakan upaya penguatan pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian.

Sistem Pengendalian Internal Pada Gereja

Berdasarkan Tata Gereja GKP Jabar (2014:Pasal 106) tata kelola keuangan gereja, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan keuangan wajib memasukan unsur pengendalian internal yang baik, diantaranya adalah:

- a. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan keuangan.
- b. Adanya sebuah prosedur pencatatan transaksi keuangan.
- c. Adanya pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan.

2.2.5. Kas

A. Pengertian Kas

Kas Merupakan salah satu unsur aktiva yang paling penting karena merupakan alat pertukaran atau pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi. Kas terbagi menjadi dua yaitu kas besar dan kas kecil. Kas besar adalah kas yang dikeluarkan dengan nominal tertentu yang relatif besar, dan biasanya dengan menggunakan cek.

Menurut Martini (2012:180) kas adalah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban dan membiayai kegiatan organisasi. Adapun menurut Soemarso S.R (2010:296) kas adalah segala sesuatu yang dapat tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

Sedangkan menurut PSAK No.2 (IAI, 2013:22) kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas atau cash adalah sebuah account atau rekening yang memiliki sifat paling lancar dalam kelompok asset aktiva. Di dalam penerapan bookkeeping atau pembukuan, kas dibagi menjadi beberapa rekening atau account beberapa jenis diantaranya, yaitu:

1. Petty Cash (kas kecil) dan General Cash (Kas Umum)
2. Petty Cash (kas kecil) dan Checking Account (kas bank)
3. Petty Cash (kas kecil) dan Cash Bank A dan Bank B

Pemecahan akun-akun ini dimaksudkan agar lebih mempermudah pengawasan dan proses pemeriksaan terhadap pendistribusian kas itu sendiri. Pemecahan akun kas ini terjadi hingga tingkat general ledger atau buku besar sedangkan pada neraca umumnya akan dijadikan satu kelompok saja yaitu akun kas. Hal tersebut dilakukan agar laporannya menjadi lebih sederhana serta lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pembayaran yang likuid, mudah dipindahtangankan dan tidak dibuktikan kepemilikannya sehingga pengendalian kas sangat diperlukan melalui sistem pengendalian yang baik.

B. Sistem Penerimaan Kas

Secara garis besar sistem akuntansi penerimaan kas adalah sebuah catatan yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang telah siap dan bebas digunakan untuk kegiatan akan dijalankan oleh perusahaan atau organisasi (Mulyadi, 2016:379).

Menurut Romney dan Steinbart (2015:441) sistem penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan,

penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban penerimaan kas.

Sedangkan Sujarweni (2015:121) sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman bank, dan setoran modal baru. Terdapat dua sumber penerimaan kas perusahaan, yaitu penjualan tunai dan piutang atau pembayaran dari penjualan kredit.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari sumber-sumber yang sudah ditentukan seduai dengan keadaan dan karakteristik organisasi. Sedangkan sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah formulir, catatan, prosedur, alat yang digunakan dalam proses penerimaan kas dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk mengawasi operasional organisasi.

Sumber Penerimaan Kas Gereja

Sebagai sebuah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada laba atau keuntungan, menurut Tim Akuntansi Keuskupan Agung (2018:145) gereja memiliki beberapa sumber penerimaan kas yang utama, yaitu:

a. Persembahan jemaat pada setiap ibadah minggu

Pada setiap ibadah minggu dilaksanakan jemaat dengan sukarela memberikan persembahan kepada gereja.

b. Sumbangan dari para donatur

Donatur menyumbangkan sejumlah uang kepada gereja melalui rekening gereja atau memberikannya secara langsung kepada pengurus gereja

c. Perpuluhan yang diberikan para jemaat

Sebuah konsep gereja dimana jemaat memberikan 10% dari penghasilan mereka selama sebulan penuh dengan maksud mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini tidak diwajibkan, tergantung kesadaran diri dari masing-masing anggota jemaat.

d. Persembahan pada ibadah lain yang dilaksanakan gereja

Persembahan ini diberikan ketika gereja melakukan kegiatan ibadah selain ibadah minggu, seperti Ibadah Rumah Tangga, Ibadah Pemuda dan Remaja, Ibadah Sekolah Minggu, Ibadah Komisi Bapak, Ibadah Komisi Ibu, dan Ibadah-ibadah lainnya yang dilaksanakan oleh gereja.

Sedangkan menurut Tata Gereja GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta (2014:Pasal 104) sumber penerimaan kas yang pada GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta adalah:

- a. Persembahan dari anggota jemaat
- b. Sumbangan atau hibah dari anggota jemaat, anggota masyarakat atau pemerintah
- c. Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja, Tata Tertib GKP Jabar maupun Pemerintah.

C. Sistem Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2016:464) didalam bukunya menjelaskan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sebuah sistem yang dirancang guna membiayai berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas di dalam sebuah organisasi.

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2010:318) pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan berkurangnya kas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas, yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan.

Sumber Pengeluaran Kas Gereja

Menurut Tim Akuntansi Keuskupan Agung (2018:149), pengeluaran dana yang dikeluarkan gereja antara lain adalah:

1. Beban Tidak Terikat-Program Rutin

a. Definisi

Beban tidak terikat-program rutin adalah pengurangan/penggunaan aktiva bersih yang tidak terikat untuk membiayai semua program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gereja.

b. Penjelasan

Beban Tidak Terikat-Program Rutin Terdiri Dari:

- 1) Untuk bidang liturgi dan peribadatan, yaitu bidang yang secara khusus menangani program kegiatan liturgi dan peribadatan, yang terdiri dari: Biaya Litugi, Beban Tim Kerja Liturgi dan Peribadatan, Beban Tim Kerja Pemusik, Beban Tim Kerja Tata Usaha, dan Peribadahan Lain-lain.
- 2) Untuk Bidang Pewartaan, yaitu bidang yang secara khusus menangani program kegiatan dalam bidang pewartaan dan evangelisasi, yang terdiri dari: Beban Bidang Pewartaan, Beban Tim Kerja Pendampingan Iman Anak, Beban Pendampingan Iman Remaja, Beban Tim Kerja Pendampingan Iman Usia Lanjut, Beban Tim Kerja Komunikasi Sosial dan Beban Tim Kerja Pewartaan dan Evangelisasi Lain-lain.
- 3) Untuk Bidang Rumah Tangga, yaitu bidang yang secara khusus menangani program dan kegiatan rutin serta tugas dalam bidang rumah tangga, yang terdiri dari: Beban Tim Kerja Bidang Rumah Tangga.

2. Beban Tidak Terikat-Kegiatan Rutin

a. Definisi

Beban Tidak Terikat-Kegiatan Rutin adalah pengurangan/penggunaan aktiva bersih tidak terikat yang dilakukan dalam rangka membiayai kegiatan rutin gereja.

b. Penjelasan

Beban Tidak Terikat-Program Rutin diklasifikasikan berdasarkan tujuan pengeluarannya yang terdiri dari:

- 1) Beban Karyawan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai hal yang terkait dengan karyawan gereja, yang terdiri dari: Pengeluaran untuk Gaji, Tunjangan dan Upah, Uang Pengganti Hari Libur, Jaminan Kesehatan dan Pensiun, Kesejahteraan Karyawan, Pengembangan Karyawan, dan Beban Karyawan Lain-lain.
- 2) Beban Keperluan Gereja, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai berbagai keperluan gereja khususnya untuk keperluan penyelenggaraan ibadah, yang terdiri dari: Pengeluaran Anggur dan Lilin, Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadat Khusus, dan Beban Keperluan Gereja Lain-lain.
- 3) Beban Keperluan Rumah Tangga, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai keperluan rumah tangga, yang terdiri dari: Pengeluaran Untuk Perlengkapan Kebersihan, Keperluan Dapur, Listrik, Telpon/Wifi, Air, Transportasi, Iuran Kemasyarakatan dan Beban Keperluan Rumah Tangga Lain-lain.
- 4) Beban Keamanan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayain keamanan disekitar lingkungan gereja.
- 5) Beban Perawatan dan Perbaikan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perawatan dan perbaikan aktiva tetap gereja, yang terdiri dari: Perawatan dan Perbaikan Bangunan, Perawatan Kendaraan dan Perawatan Inventaris.
- 6) Beban Lain-Lain, yaitu terdiri pengeluaran untuk biaya yang tidak bisa diklasifikasikan dalam pos biaya diatas, yang terdiri dari: Rugi Penjualan Aktiva Tetap, Administrasi Bank, Pajak Bunga, Piutang Tak Tertagih, Pajak Bunga dan Lain-lain.
- 7) Beban Umum Pengurus Gereja, yaitu terdiri dari pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pengurus gereja seperti pengeluaran untuk rapat pengurus gereja.

2.3. Kerangka Konseptual Pemikiran

Didalam sebuah organisasi, informasi merupakan sebuah hal yang sangat penting, Karena dengan informasi tersebut organisasi akan dapat membuat keputusan yang tepat sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi dalam setiap organisasi.

Oleh karena itu setiap organisasi memerlukan sebuah sistem informasi akuntansi yang dimana sistem tersebut berfungsi untuk mengolah data-data setiap transaksi keuangan yang terjadi di organisasi menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pihak manajemen membuat sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan dari organisasi dan untuk menjaga aset-aset organisasi.

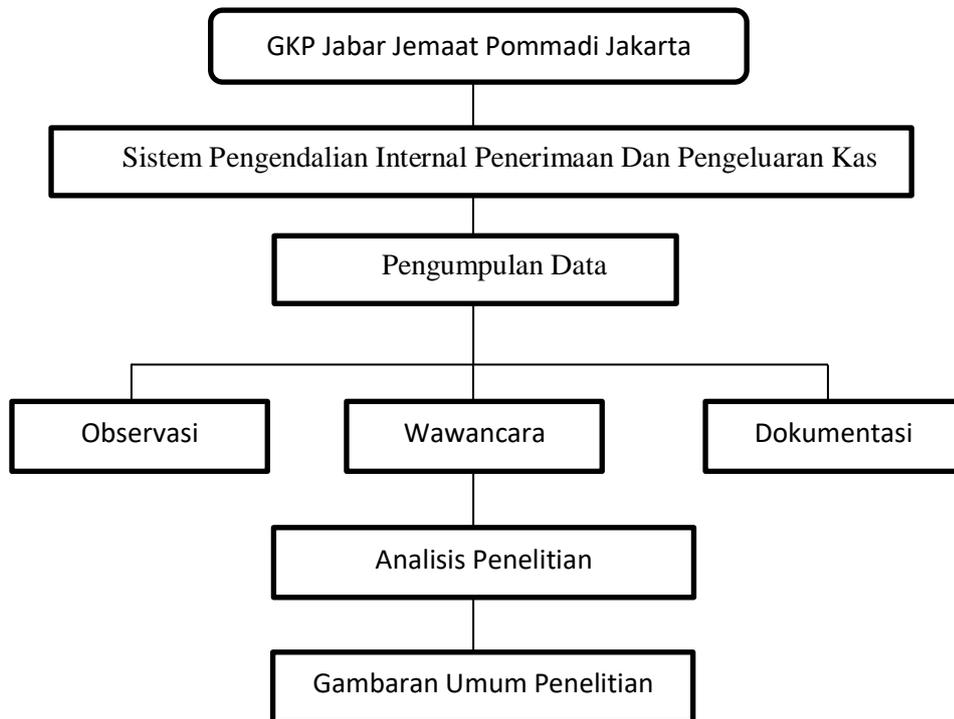
Organisasi nirlaba keagamaan seperti gereja juga tidak terlepas dari kebutuhan akan informasi, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, informasi tersebut dapat membantu gereja dalam membuat keputusan dan menginformasikan pengelolaan keuangan gereja kepada semua anggota jemaat. Dengan demikian keterbukaan laporan keuangan gereja, terutama penerimaan dan pengeluaran kas merupakan hal yang sangat penting agar dapat meningkatkan kepercayaan jemaat dan donatur kepada pengurus gereja.

Untuk mendapatkan sebuah informasi yang baik tidak hanya diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi, melainkan dibutuhkan juga pengendalian internal. Suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki pengendalian internal yang baik pula. Pengendalian internal adalah sekumpulan prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi yang didalam pelaksanaan tugasnya untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas perusahaan dengan tujuan mencegah dan menghindari timbulnya penyelewengan.

Duncan dan Morris (2014) menyatakan bahwa baik atau tidaknya pengendalian internal pada sebuah gereja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyimpangan yang ada pada gereja tersebut. Oleh Karena itu penerapan pengendalian internal yang baik pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas disebuah gereja sangatlah diperlukan untuk

menghindari kecurangan dan kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berpijak pada pemikiran diatas, maka penulis akan melakukan penelitian pada GKP Jabar Jemaat Pommadi Jakarta untuk mencari tahu bagaimana penerapan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah dilaksanakan. Penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual